



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
" PUSKUSA BALIDWIPA "

Jl. Raya Buruan - Blahbatuh Gianyar Telp. (0361) 948947 Fax. (0361) 948947
Email : pbalidwipa@yahoo.com

TATA KELOLA

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

PUSKUSA BALIDWIPA



TAHUN 2023

DISUSUN OLEH

DIREKSI :

(I GST.NGR.ALIT SUPERMADI,SH) (DSK MD.TIRTAYASA, SE)
DIREKTUR UTAMA DIREKTUR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl. Raya Buruan Blahbatuh Gianyar

Nomor Telepon : 361948947

Penjelasan Umum : Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank Perkreditan Rakyat Puskusa Balidwipa tahun 2023 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, tanggal 1 April 2015 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank Perkreditan Rakyat Puskusa Balidwipa tahun 2022 terdiri dari :Transparansi Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada butir VII.7, Surat Edaran nomor 5/SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016,Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG tahun 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	I Gusti Ngurah Alit Supermadi,SH	Direktur Utama	Menentukan kebijakan umum dalam memimpin Bank untuk mencapai tujuan Perusahaan.Bertanggung jawab kepada semua kegiatan dalam tugas operasional Bank/Perusahaan dan nbawa misi pengenalan misi Perusahaan pada umum dengan melakukan Fungsi Humas.Bertanggung jawab dan mengurus semua harta kekayaan Perusahaan dan mengawasi jalannya operasional Bank.Menyusun rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja perusahaan setiap tahun bersama-sama dengan semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi.Mengadakan perubahan- perubahan dalam struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha Bank.Membuat keputusan dalam hal memberikan kredit (penjaminan) kepada calon nasabah yang batas-batas wewenangnya telah dituangkan dalam S.P.I (Sistim Pengendalian Intern) PT.BPR.PUSKUSA BALIDWIPA.Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, besama-sama dengan semua anggota Dewan Komisaris dan Direktur, sekaligus menyampaikan laporan pertanggung jawaban Direksi untuk tahun buku yang bersangkutan.Menandatangani surat-surat berharga dan dokumen penting Perusahaan, baik sendiri maupun bersama Direktur maupun dengan salah seorang Dewan Komisaris.Menandatangani surat-surat keputusan Direksi secara sendiri atau bersama-sama yang meliputi skala gaji, promosi, mutasi dan pemberhentian karyawan.Membina hubungan dengan para pejabat Bank Indonesia dan Departemen Keuangan agar tercipta kerja sama dan bimbingan dari kedua instansi Pembina tersebut.Bertanggung jawab terhadap pencapaian rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.Menandatangani laporan-laporan Bank yang penting, khususnya laporan kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak ekstern lainnya.Mengendalikan dan mengawasi tugas-tugas pemberian persetujuan kredit, pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan dan pendanaan Bank.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Desak Made Tirta yasa,SE	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Bertanggung jawab atas penyusunan kebijaksanaan perusahaan di bidang administrasi, keuangan, kepegawaian dan umum serta perkreditan dalam upaya mengembangkan tingkat kesehatan dan pertumbuhan Bank.Merancang dan menetapkan system akomodasi dan memonitor seluruh hasil kegiatan Bank dan mengelola manajemen Bank.Memonitor dan mengevaluasi laporan pengendalian biaya, perubahan dan perkembangan pendapatan Bank secara periodic dan berkesinambungan.Bertanggung jawab atas penyusunan laporan/program dan realisasi anggaran serta realisasinya pada setiap periode pertanggung jawaban anggaran.Bersama-sama dengan Direktur Utama menandatangani persetujuan kredit pada forum rapat panitia kredit.Mewakili tugas direktur Utama bila sedang berhalangan.Melakukan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam kantor terhadap semua unit kerja.Memeriksa dan mengawasi administrasi keuangan Bank.Meneliti kebenaran dan kelengkapan atas laporan keuangan, terutama neraca dan perhutangan Rugi/Laba perusahaan.Menyelenggarakan dan mempersiapkan bahan-bahan laporan untuk rapat-rapat Direksi dan Komisaris.Mengangkat dan memberhentikan karyawan atas usulan dari Pimpinan Unit setelah dipertimbangkan dengan Direktur Utama.Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Direktur Utama sepanjang masih dalam lingkup tugas dan fungsinya sebagai Direktur Perusahaan.Direktur berwenang memberikan persetujuan kredit dengan limit yang telah dituangkan dalam SPI dalam batas-batas wewenangnya
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris			
Sudah Melaksanakan fungsi kepatuhan			
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			
Pelaksanaan sesuai POJK			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	I Nyoman Kertajaya,SE	Komisaris Utama	Mewakili Pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap Direksi atas oprasioanal apakah sesuai dengan aturan yang ada. Menyetujui dan mengesahkan rencana kerja jangka pendek maupun jangka panjang yang disusun oleh Direksi.Mengetahui realisasi kredit sesuai batasan wewenang Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan-laporan manajemen secara berkala.Bersama-sama dengan anggota Direksi menyetujui dan mengesahkan peraturan-peraturan Perusahaan.Secara berkala mengadakan rapat-rapat antar Dewan Komisaris Minimal 4 kali setahun sebagai pengawasan terhadap hasil kerja direksi dan memberikan pengarahan dan tanggapan-tanggapan atas hasil yang telah dicapai oleh Perusahaan.Membuat Laporan realisasi rencana Kerja dan hasil pengawasannya secara semesteran ke Otoritas Jasa KeuanganMelaporkan hasil pengawasannya ke pemegang saham dalam Rapat pertanggung jawaban Direksi .Melaksanakan tugas-tugas lain sepanjang masih berada dalam ruang lingkup dan fungsi Dewan Komisaris.
2	Drs, I ketut Putra Suasta	Komisaris dan Independen	Mewakili Pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap Direksi atas oprasioanal apakah sesuai dengan aturan yang ada. Menyetujui dan mengesahkan rencana kerja jangka pendek maupun jangka panjang yang disusun oleh Direksi.Mengetahui realisasi kredit sesuai batasan wewenang Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan-laporan manajemen secara berkala.Bersama-sama dengan anggota Direksi menyetujui dan mengesahkan peraturan-peraturan Perusahaan.Secara berkala mengadakan rapat-rapat antar Dewan Komisaris Minimal 4 kali setahun sebagai pengawasan terhadap direksi dan memberikan pengarahan dan tanggapan-tanggapan atas hasil yang telah dicapai oleh Perusahaan. Membuat Laporan realisasi rencana Kerja dan hasil pengawasannya secara semesteran ke Otoritas Jasa Keuangan.Melaporkan hasil pengawasannya ke pemegang saham dalam Rapat pertanggung jawaban Direksi .Melaksanakan tugas-tugas lain sepanjang masih berada dalam ruang lingkup dan fungsi Dewan Komisaris.

Rekomendasi Kepada Direksi

Memantau pelaksanaan fungsi kepatuhan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Memantau pelaksanaan fungsi kepatuhan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	I Gusti Ngurah Alit Supermadi,SH	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Desak Made Tirta yasa,SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi tidak ada hubungan keuangan pada BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	I Gusti Ngurah Alit Supermadi,SH	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Desak Made Tirta yasa,SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi tidak ada hubungan keluarga pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	I Nyoman Kertajaya,SE	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Drs, I ketut Putra Suasta	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris tidak ada hubungan keuangan pada BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	I Nyoman Kertajaya,SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Drs, I ketut Putra Suasta	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris tidak ada hubungan keluarga anggota pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	146578765	2	108967560
2	Tunjangan	2	73800000	2	0
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		220378765		108967560

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	Tidak ada
4	Fasilitas lainnya	BPJS Ketenagakerjaan	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,38	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,28	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,26	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,10	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,19	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	07-02-2023	5	Perkembangan BPR tahun 2022 dan pembahasan Hasil Pemeriksaan OJK
2	11-04-2023	4	Evaluasi kinerja sampai bln maret dan persiapan RUPS
3	05-05-2023	16	Evaluasi kinerja sampai pebruari 2023 dan Motivasi dari Dewan Komisaris
4	12-05-2023	14	Pembahasan Temuan SPI dan pencapaian sd April 2023
5	12-06-2023	7	Pembahasan pencapaian RBB sd Mei 2023 dan persiapan Bulan Inklusi keuangan
6	26-08-2023	16	Pelatihan APU-PPT diteruskan dengan rapat pembahasan kinerja
7	23-11-2023	4	Pembahasan penyelesaian kredit bermasalah dan kredit Restru Covid
8	31-10-2023	12	Pencapaian tahun 2023,dan kiat kiat untuk mencapai target tahun 2024, motivasi dari dekom

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	I Nyoman Kertajaya,SE	2	0	25,00
2	Drs, I ketut Putra Suasta	2	0	25,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Footer 1

Form A.11.00
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	0	0	0	0	Deposito	0 0	
2	0	0	0	0	Tarik Tunai	0 0	
3	0	0	0	0	Debit	0 0	

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230307	Kegiatan Sosial	Menjenguk aryawana melahirkan	Ni Luh Putu Julianasari	500.000
2	20230420	Kegiatan Sosial	Kundangan Pernikahan	Pak Pande	100.000
3	20230608	Kegiatan Sosial	Besuk Karyawan sakit	Igst MadeDarmawan	300.000
4	20230727	Kegiatan Sosial	Besuk Karyawan sakit demam	Wedayanti	500.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31-12-2021

Alamat : Jl. Raya buruan Blahbatuh Gianyar

Nomor Telepon : 0361 948947

Modal Inti BPR : 6.180.912.922,00

Total Aset BPR : 14.050.801.650,00

Bobot BPR : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 2,2

Peringkat Komposit : 2

Analisis : Dari hasil penilaian penerapan tatakelola nilai baik ini tercermin dari pemenuhan prinsip tatakelola ,apabila ada kelemahan penerapan tatakelola segera sudah ditindaklanjuti oleh manajemen sehingga hasil penilaian semakin membaik

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,70	0,20	1,40	0.290	Secara umum direksi telah mempertanggungjawabkan laporan keuangan dan telah mensosialisasikan kebijakan kepada seluruh karyawan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,61	0,95	0,20	1,76	0.264	Dewan komisaris sudah terpenuhi dan telah melakukan pengawasan atas operasional BPR
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Kami tidak membentuk komite hanya menunjuk Pejabat Eksekutif
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	0,80	0,40	2,70	0.270	Benturan kepentingan yang ada tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan yang ada
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,20	1,20	0,33	2,73	0.273	Belum ditemukannya penyimpangan kebijakan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,20	1,10	0,23	2,53	0.263	Audit Intern telah melakukan pemeriksaan secara rutin dan telah menyusun rencana audit akan tetapi masih perlu penyempurnaan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,15	1,05	0.026	Penunjukan audit ekstern telah mendapatkan persetujuan dari RUPS
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,34	1,32	0,35	3,01	0.306	BPR telah menunjuk Pejabat Yang menangani manajemen risiko dan telah menerapkan sistem pengendalian intern dengan tidak ada rangkap jabatan
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	1,00	0,00	2,00	0.150	BPR telah mempunyai kebijakan tentang BMPK dan selalu melakukan pengkinian sesuai dengan aturan yang ada
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,17	0,80	0,10	2,07	0.155	Rencana Bisnis telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh komisaris dan mendapat dukungan dari pemegang saham
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	1,00	0,20	2,70	0.203	BPR telah memiliki sistem yang mampu menyajikan laporan secara cepat dan tepat
Nilai Komposit						2.2	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah anggota direksi BPR 2 Orang 1 Orang Dirut dan 1 orang direktur yang membawahi fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Kartu Identitas diri
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Tidak ada menjabat di bank lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Anggota direksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sesama direksi dan komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Tidak menggunakan konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	semua anggota direksi telah bersrtifikasi
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi Melaksanakan Tugas Secara Independen
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dengan membuat action plan penyelesaian akan tetapi ada beberapa yang belum ditindaklanjuti
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi selalu menyediakan data yang akurat kepada dewan komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Keputusan rapat Direksi dilakukan secara musyawarah dan mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran yang berkelanjutan
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Anggota direksi mampu mengimplementasikan kemampuan yang dimiliki
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi selalu berpedoman pada tata tertib yang dimiliki BPR
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggungjawabkantugasnya melalui dengan membuat notulen RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi mengkomunikasikan kebijakan BPR kepada seluruh karyawan melalu rapat tetapi belum sepenuhnya dipahami oleh pegawai
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Hasil rapat direksi dituangkan dalam notulen rapat dan disatukan dengan rapat dewan komisaris tetapi belum pernah mencatumkan dissenting opinion
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Adanya peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan BPR akan tetapi hasil belum sesuai dengan ekspektasi stakeholder
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Secara rutin membuat laporan tatakelola
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,22	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Sesuai RUPS tgl 14 April 2023 jumlah anggota komisaris 2 orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah komisaris sesuai dengan ketentuan
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Keterangan semua komisaris sudah bersertifikasi dari LSP dan diperpanjang gsebelum masa jabatan berakhir
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Kedua komisaris bertempat tinggal di propinsi yang sama dibuktikan dengan KTP
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Salah satu komisaris merupakan komisaris independe
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Komisaris telah memiliki pedoman kerja
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Komisaris tidak merangkap jabatan pada BPR lain
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Sesama Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Komisaris independen tidak mempunyai hubungan keluarga dengan komisaris lainnya
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,61	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabdi buktikan dengan laporan komisaris
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	3	Dalam melakukan tugas pengawasan komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kebijakanstrategis
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	3	Dewan komisaris tidak terlibat dalam pengambilan kegiatan operasional
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan komisaris memastikan direksi menindaklanjuti temuan audit dengan cara membuat laporan action plan
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Rapat dewan komisaris dan pengurus dilakukan secara bersama,dan dibuktikan dengan adanya notulen rapat

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat dewan komisaris dilakukan berdasarkan hasil musyawarah mufakat
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota dewan komisaris tidak menggunakan kepentingan pribadi yang merugikan keuntungan bpr
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	dewan komisaris belum melakukan pemantauan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	2,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,95	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat dewan komisaris dituangkan dalam risalah dan sudah didokumentasikan dengan baik akan tetapi dalam bentuk kesimpulan rapat
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	Bpr mempunyai sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan tapi belum dituangkan dalam risalah rapat
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dewan komisaris, anggota direksi dan pejabat eksekutif selalu memikirkan segala tindakan yang diambil supaya tidak merugikan keuntungan BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	4	Benturan kepentingan yang terjadi tidak berpengaruh secara material dan kebijakan yang diambil tidak tertuang dalam suatu keputusan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan belum seluruhnya memahami pojk dan undang undang perbankan terutama pojk yang terbaru
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Pelaksanaan fungsi kepatuhan telah dibantu pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	PE kepatuhan belum seluruhnya mengkinikan pedoman , sistem dan prosedur kepatuhan karena pejabat baru diangkat
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memiliki ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab PE kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,20	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan sudah menetapkan langkah langkah untuk memenuhi peraturan POJK
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah melakukan sosialisasi dan pelatihan terkini tapi belum dilakukan secara berkesinambungan
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan sudah memantau dan menjaga kepatuhan bpr kepada OJK
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat eksekutif kepatuhan sudah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan dan prosedur sudah sesuai dengan ketentuan OJK
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Satuan kerja kepatuhan belum melakukan revidi dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan yang dimiliki Bpr Agar sesuai dengan peraturan OJK dan peraturan perundang undangan
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	Karena semua oprasional BPR sudah diatur sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	4	Anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan belum memberi tembusan laporan pelaksanaan kepada direktur utama dan komisaris secara tertulis
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Belum ditemukannya penyimpangan kebijakan atau keputusan direksi yang menyimpang sehingga belum menyampaikan laporan khusus ke OJK
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	3,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,33	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR sudah mengangkat pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	PE sudah mengkinikan pedoman kerja dan prosedur untuk melaksanakan tugas audit inter sesuai peraturan perundang undangan
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap audit intern tidak terlibat didalam penghimpunan dan penyaluran dana
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	4	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,20	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	Bpr Sudah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Keterangan
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit interen dilaksanakan secara memadai dan independen akan tetapi belum dilakukan secara menyeluruh seperti audit TI , audit MR
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	4	Sudah pernah melakukan pelatihan akan tetapi tidak secara berkelanjutan
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Sudah melakukan audit dan memberikan tembusan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Bpr telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan laporan pokok hasil audit kepada ojk akan tetapi masih perlu dilengkapi
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bpr sudah menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan audit kepada akuntan publik sudah tercantum didalam perjanjian kerja Kap sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Bpr menunjuk akuntan publik sudah memperoleh persetujuan dari RUPS berdasarkan usulan dari dewan komisaris
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bpr telah melaporkan hasil audit kepada otoritas jasa keuangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit telah disampaikan secara tepat waktu kepada Bpr
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil audit sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur OJK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	3	Bpr telah menunjuk PE yang bertanggungjawab pada fungsi penerapan manajemen resiko akan tetapi masih perlu banyak pelatihan pelatihan
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	Bpr sudah memiliki Kebijakan manajemen resiko dan prosedur manajemen resiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Bpr sudah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis dengan no SOP : No 03/SK-DIR/PBD/2016
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,34	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	Direksi menyusun kebijakan dan pedoman manajemen resiko secara tertulis.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	4	Dewan komisaris belum memberikan rekomendasi tentang penerapan manajemen resiko
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	5	Bpr belum menerapkan proses identifikasi pengendalian resiko
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh terbukti dengan tidak adanya rangkap jabatan dan adanya pemisahan tugas dan tanggungjawab
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menerapkan seluruh resiko yang diwajibkan (Kredit ,oprasional,Likuiditas dan kepatuhan)
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Bpr sudah memiliki sistem yang memadai untuk menyediakan data dan informasi yang lengkap,akurat,kini dan utuh
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen resiko pada seluruh jenjang organisasi akan tetapi belum berkesinambungan
	Total nilai skala penerapan	23	
	Rata-rata	3,29	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,32	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bpr telah menyusun laporan propil resiko sesuaidengan ketentuan (4 Resiko)dan belum menyusun resiko lain yang
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	5	Bpr belum menyusun laporan produk dan aktiviatas baru yang dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan sesuai ketentuan otoritas jasa keuangan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	3,50	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,35	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Bpr sudah memiliki kebijakan tertulis mengenai BMPK monitoring dan penyelesaiannya sudah tercantum di dalam sop PKPB
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	Bpr secara berkala melakukan pengkinian kebijakan sistem dan prosedur BMPK akan tetapi belum melakukan evaluasi
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Pemberian kredit kepada pihak terkait atau pemberian kredit besar sudah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan BMPK sudah Dikirimkan kepada OJK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Pemberian kredit tidak melampaui BMPK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana bisnis telah disusun oleh direksi dan disetujui oleh dewan komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis bpr sudah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk penyelesaiannya.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	Pada Dasarnya Pemegang saham mendukung penuh Rencana Bisnis Bank akan tetapi belum dapat dilaksanakan dengan baik karena keterbatasan SDM
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana bisnis bpr disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal dan prinsip kehati hatian
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan komisaris sudah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis bpr
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis termasuk perubahannya sudah disampaikan ke OJK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi yang memadai akan tetapi masih kurangnya kemampuan SDM dalam menggunakan sistem
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bpr sudah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit membuat laporan keuangan dan informasi lainnya.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bpr sudah membuat laporan tahunan dengan materi paling sedikit membuat informasi umum, laporan keuangan dan opini dari akuntan atas laporan keuangan tahunan Bpr.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Bpr melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah sesuai ketentuan Ojk
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Bpr sudah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur oleh Ojk
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh satu anggota direksi dengan mencantumkan nama secara jelas
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

"PUSKUSA BALIDWIPA"

Jl. Raya Buruan - Blahbatuh Gianyar Telp. (0361) 948947 Fax. (0361) 948947
Email : pbalidwipa@yahoo.com

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat kami simpulkan bahwa : PT BPR Puskusa Balidwipa, memperoleh nilai komposit sebesar 2,2 atau baik, hal ini tercermin dalam pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola.

Kelemahan dan penyebabnya rencana tindak yang merupakan tindakan korektif beserta target waktu pelaksanaannya dan kekuatan penerapan tata kelola.

Dengan hasil tersebut BPR Puskusa Balidwipa senantiasa menindaklanjuti hasil penilaian OJK sehingga hasil penilaian BPR Puskusa Balidwipa akan semakin meningkat.

Gianyar, 16 Januari 2024

PT Bank Perkreditan Rakyat Puskusa Balidwipa

(I Gusti Ngurah Alit Supermadi, SH) (Desak Made Tirta Yasa, SE)

Direktur Utama

Direktur

Disetujui,

Dewan Komisaris

(I Nyoman Kertajaya, SE) (IDrs. I Ketut Putra Suasta)

Komisaris utama

Komisaris